

## ABSTRAK

Sandy Andriansyah, NIM 1183060072, **Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam..**

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah dengan melihat fakta bahwa manusia saat ini dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Inovasi yang dihadirkan melalui teknologi dapat dikatakan telah membawa manfaat besar bagi manusia. Namun kemudahan yang dihadirkan melalui teknologi tidak selamanya memberikan manfaat, dengan kompleksnya perkembangan teknologi saat ini bahkan dapat menghadirkan musibah serta menjadi jalan baru akan timbulnya kejahatan, salah satunya adalah kejahatan *carding* sebagai bentuk kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan teknologi. Dalam konsepsi hukum pidana islam, permasalahan tersebut merupakan permasalahan kontemporer yang membutuhkan jawaban sehingga perlu dilakukan pembahasan berdasarkan perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur dan sanksi tindak pidana *carding* dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teori yang digunakan adalah Teori Tujuan Pidana sebagai suatu konsep yang menjadi alasan sebuah pidana dijatuhkan dan Teori *Mashlahah* yang merupakan prinsip untuk menggapai manfaat dan menolak *madharat* terhadap makhluk sehingga makhluk merasa nyaman dan damai dan untuk memelihara tujuan-tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid syariah*)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yang dilakukan dengan pendekatan *konten analisis* secara normatif terhadap isi dari Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum pidana islam dengan merujuk pada sumber data primer dan sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 32 dan pasal 48 berkedudukan sebagai undang-undang khusus yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana *carding* yang apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 32 UU ITE tersebut. Sedangkan hukum pidana islam memandang bahwa unsur-unsur dan sanksi tindak pidana *carding* dalam pasal 32 dan pasal 48 UU ITE termasuk ke dalam *jarimah takzir* karena unsur-unsur dalam tindak pidana *carding* walaupun memiliki kesamaan dengan pencurian, namun terdapat unsur dan syarat yang tidak terpenuhi dalam *jarimah* pencurian yang menyebabkan hukuman *had* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding*.

**Kata Kunci :** *Carding*, Tindak Pidana, *Fiqih Jinayah*